Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LANDAK

Rosiska*, Ali Afif, Sartono, Rizky Fakhrol Yahya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Bhakti

E-mail : rosiskasiswa656@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled "Analysis of Potential Hotel Tax and Restaurant Tax Revenues in Landak District". Regional autonomy currently needs to be reviewed to find sources of regional income, Landak Regency has considerable potential in tax revenues, especially hotel taxes and restaurant taxes. This research was conducted with the aim of knowing the magnitude of the potential for hotel tax and restaurant tax in 2021, the factors that are obstacles to hotel tax and restaurant tax revenue and also to find out the efforts made by BPRD in overcoming obstacles to hotel tax and restaurant tax revenue. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach which is a writing that describes the actual situation based on the object under study, according to the actual situation at the time the research took place. The analytical tool used is potential analysis using the potential calculation formula and questionnaire analysis. The results of the potential calculation show that the potential for hotel taxes and restaurant taxes is very large for hotel taxes, namely Rp. 330,386,450. compared to the realization that was received in 2021 it was relatively low, namely only Rp. 145,347,320. while for the restaurant tax Rp. 2,855,395,000. compared to the realization that was received in 2021 it was relatively low, namely only Rp. 2,507,541,762. factors constraining the lack of understanding of hotel and restaurant tax payers regarding tax payments and sanctions that are not fully applied to taxpayers. Efforts made by BPRD to overcome tax revenue constraints by conducting outreach to hotel and restaurant tax payers.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Potential

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Landak". Otonomi daerah saat ini perlu ditinjau kembali untuk mencari sumber pendapatan daerah, Kabupaten Landak memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak terutama pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besar potensi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2021, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPRD dalam mengatasi kendala penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu penulisan yang menggambarkan keadaan sebenarnya berdasarkan objek yang diteliti, sesuai keadaan sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi dengan menggunakan rumus penghitungan potensi dan analisis kuisioner. Hasil penghitungan potensi menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar untuk pajak hotel yaitu sebesar Rp. 330.386.450. dibandingkan dengan realisasi yang di terima pada tahun 2021 relatif rendah yaitu hanya sebesar Rp.145.347.320. sedangkan untuk pajak restoran Rp.2.855.395.000. dibandingkan dengan realisasi yang di terima pada tahun 2021 relatif rendah yaitu hanya sebesar Rp.2.507.541.762. faktor-faktor yang menjadi kendala kurangnya pemahaman wajib pajak hotel dan pajak restoran tentang pembayaran pajak dan sanksi yang tidak sepenuhnya diterapkan kepada wajib pajak. Upaya yang dilakukan BPRD untuk mengatasi kendala penerimaan pajak dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak hotel dan pajak restoran.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Potensi

PENDAHULUAN

Otonomi daerah saat ini perlu ditinjau kembali untuk mencari sumber pendapatan daerah yang dapat menutupi biaya-biaya pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah juga perlu mendukung semuanya untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah. Pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak memungut imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pembagiannya berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi beberapa pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Salah satu pajak yang berpotensi tumbuh seiring dengan meningkatnya perekonomian adalah pajak restoran dan pajak hotel, sektor ini memiliki prospek yang baik untuk pendapatan daerah karena dengan bertambahnya sektor kuliner dan wisata maka penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah. Kesiapan yang harus dimiliki para pelaku usaha juga harus dalam mengelola keuangannya yaitu dalam memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya (Ali Afif, 2021b). Laporan keuangan memiliki manfaat dalam memberikan sebuah informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya mengenai laporan keuangan yang disajikan secara wajar (Ali Afif, 2021a). Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Landak Tahun 2018-2021 bahwa realisasi pajak hotel mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 target pajak hotel sebesar Rp.254.928.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.156.246.600, tahun 2019 mengalami peningkatan karena target pajak hotel di turunkan sebesar Rp.235.340.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 201.948.100, tahun 2020 karena pengaruh pandemi target pajak hotel di turunkan secara drastis yaitu sebesar Rp. 81.200.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 95.150.600, dan pada tahun 2021 target pajak hotel kembali di tingkatkan menjadi Rp.100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.145.347.320.

Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Landak Tahun 2018-2021 masih tidak stabil karena masih mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018-2019, dimana pada tahun 2018 target sebesar Rp.2.222.744.000 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 1.931.601.002, tahun 2019 target untuk pajak restoran di naikan sebesar Rp.2.263.728.000 dan yang terealisasi sebesar mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.313.561.617, untuk tahun 2020 target pajak diturunkan sebesar Rp.1.930.490.000 dan yang terealisasi mengalami penurunan sebesar Rp.1.121.518.027, untuk tahun 2021 target Kembali ditingkatkan sebesar Rp.2.463.500.000, dan realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp.2.507.541.762.

Dari data diatas menunjukkan tingkat pencapaian terhadap target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Landak hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi yang lebih besar dari realisasinya. Berdasarkan kondisi ini perlu menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran yang ada di kabupaten landak. Dalam hal ini juga proses pelaporan pajak masih menghadapi masalah yaitu kesadaran wajib pajak yang masih relatif rendah, sehingga sering terjadi pelaporan pajak yang masih mengira-ngira, dan tidak melaporkan pajaknya tepat waktu jika tidak didatangi langsung oleh pihak pajak. Dalam hal ini memerlukan peran dan upaya untuk pajak khususnya dalam proses penerimaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran warga negara untuk kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan dapat dilihat dan digunakan untuk melunasi pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Menurut Siahan (2013), Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan praturan daerah (perda), hak pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dan hasilnya adalah digunakan sebagai pembiayaan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas akomodasi/rekreasi dan mencakup layanan berbayar seperti motel, losmen, pondok wisata, rumah kos dengan lebih dari 10 kamar.

Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Landak No 04 tahun 2011 Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat di mana penjual makanan dan/atau minuman membayar biaya, juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan lainnya termasuk pemulihan makanan layanan/katering. Adapun menurut Artha (2018), pajak restoran adalah merupakan pajak daerah atas pelayanan suatu restoran, termasuk dalam penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di dalam tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak daerah menurut peraturan daerah No 4 tahun 2011 Kabupaten Landak yaitu:

1. Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan.
2. Pemungutan pajak meliputi pendataan, identifikasi, penerimaan pembayaran, penagihan, akuntansi dan pelaporan, dan penyitaan.
3. Tata cara pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Setiap Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.
5. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan keputusan Badan yang harus dibayar menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Dokumen lain yang dipersamakan dengan itu pada ayat (3) berupa tiket dan; perhatikan perhitungannya.
7. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya disetor dalam: SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Potensi

Potensi hakikatnya adalah merupakan kemampuan untuk berkembang ke arah yang lebih baik, karena potensi merupakan kemampuan dasar yang sangat mungkin untuk berkembang. Menurut Nurhayati (2017) kemampuan yang dapat dikembangkan, seperti suatu kekuatan, kemampuan, dan daya yang dapat dikembangkan lebih besar lagi.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber pendapatan pemerintah pusat dan berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian uraian Pendapatan Asli Daerah di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah adalah suatu sumber pendapatan pembangunan daerah yang berasal dari pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, menafsirkan teori, menganalisisnya terhadap data objektif yang terjadi, memberikan gambaran tentang masalah penelitian, dan mencari solusi yang termasuk dalam hasil survei. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, observasi, kuisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kabupaten Landak

Analisis potensi pajak digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan pajak daerah atau kemampuan yang pantas diterima. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial di kabupaten landak, hal tersebut dilihat dari data realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang selalu mengalami kenaikan sehingga sangat penting untuk melakukan analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran untuk dapat dilakukan upaya yang lebih baik kedepannya.

Pajak Hotel

Tabel 1. Penghitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2021

Tahun	Omset/Tahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak
2021	3.303.864.500	10%	330.386.450

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil penghitungan potensi pada tabel diatas, dapat dilihat terdapat selisih penerimaan pajak pada tahun 2021 dengan potensi yang di hitung. Terdapat potensi yang ukup besar yaitu sebesar Rp. 330.386.450. dibandingkan dengan realisasi yang di terima pada tahun 2021 relatif rendah yaitu hanya sebesar Rp.145.347.320. dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat masih terdapat potensi peningkatan terhadap penerimaan pajak hotel.

Pajak Restoran

Tabel 2. Penghitungan Potensi Pajak Restoran Tahun 2021

Tahun	Omset/Tahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak
2021	28.553.950.000	10%	2.855.395.000

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil penghitungan seperti terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat terdapat selisih penerimaan pajak pada tahun 2021 dengan potensi yang di hitung. Terdapat potensi yang ukup besar yaitu sebesar Rp.2.855.395.000. dibandingkan dengan realisasi yang di terima pada tahun 2021 relatif rendah yaitu hanya sebesar Rp.2.507.541.762 dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat masih terdapat potensi peningkatan terhadap penerimaan pajak restoran.

Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Landak

Variabel Peraturan

Hasil pengisian kuisioner setiap pertanyaan pada variabel peraturan menunjukkan bahwa 4 responden menjawab “Ya”, hal ini menunjukkan bahwa semua responden setuju bahwa adanya peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Selain itu peraturan yang ada juga telah disosialisasikan pada wajib pajak hotel dan pajak restoran, dan mudah dipahami oleh bagian terkait, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Variabel Implementasi

Pada variabel implementasi ini, pertanyaan kedua menunjukkan bahwa 2 responden menjawab tidak dengan diimplementasikan kendala dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada BPRD Kabupaten Landak, sedangkan 2 responden lainnya menjawab “Ya” yang berarti menyatakan terdapat kendala dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Landak. Artinya masih terdapat kesenjangan dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada BPRD Kabupaten Landak. Kemudian mengenai pengawasan penerimaan pajak, ketentuan besaran target pemungutan, pendataan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dan upaya yang dilakukan semua responden menjawab “Ya” yang artinya bahwa implementasi pengawasan pengumpulan pajak masih ditemui kendala, besaran target ditentukan dan telah

dilakuka pendataan untuk setiap penerimaan pajak, dan terdapat upaya yang dilakukan oleh BPDR dalam mengatasi kendala penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

Variabel Sumber Daya Manusia

Mengenai variabel sumber daya manusia pada pertanyaan pertama diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 1 responden dan 3 responden lainnya menjawab “Tidak” ini menandakan bahwa masih kurangnya pegawai yang menangani penerimaan pajak. Untuk pertanyaan ke 2 diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 4 responden yang artinya bahwa semua pegawai yang menangani penerimaan pajak hotel dan pajak restoran telah memahami peraturan yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Untuk pertanyaan ke 3 di peroleh jawaban “Ya” dari 4 responden artinya bahwa pegawai telah memahami proses penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Untuk pertanyaan ke 4 di peroleh jawaban “Ya” sebanyak 3 responden sedangkan jawaban “Tidak” 1 responden ini artinya bahwa pegawai yang terkait memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas fungsi dan pokok dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Berdasarkan hasil jawaban kuisioner dari variabel sumber daya manusia dari 4 responden dapat disimpulkan bahwa pegawai yang menangani penerimaan pajak hotel dan pajak restoran telah memadai peraturan dan proses penerimaan hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan jawaban “Ya” hasil tanggapan respnden di dukung dengan adanya pengamatan penulis yangmenunjukkan bahwa pegawai yang bersangkutan dengan penerimaan pajak telah di latih dan di sosialisasikan dalam proses penerimaan pajak daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Varibel Sanksi

Variabel sanksi ini diketahui memberikan sanksi kepada wajib pajak hotel dan pajak restoran yang terlambat membayar pajak, menurut responden menunjukkan bahwa pertanyaan pertama dari total 4 responden 2 responden menjawab “Ya” dan 2 responden lainnya menjawab “Tidak” artinya bahwa sanksi yang ada belum diterapkan dengan baik. Untuk pertanyaan ke 2 dan ke 3 dari total 4 responden semua menjawab “Ya” yang artinya ada surat teguran yang di berikan kepada wajib pajak hotel dan restoran yang telah jatuh tempo dan diberikannya sanksi bertujuan agar wajib pajak hotel dan pajak restoran dapat taat membayar pajak. Responden juga menjawab “Ya” pada pertanyaan mengenai sanksi yang diberikan ditunjukkan agar dapat mendorong wajib pajak hotel dan pajak restoran taat membayar pajak. Karena dengan adanya sanksi yang berlaku bagi wajib pajak sehingga wajib pajak merasa mempunyai kewajiban karena apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi.

Analisis Upaya Yang Dilakukan Oleh BPRD Dalam Mengatasi Kendala Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Landak

Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak hotel dan pajak restoran. Sosialisasi pajak hotel dan pajak restoran dilaksanakan untuk wajib pajak, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pajak, sosialisasi ini dimaksudkan agar wajib pajak hotel dan pajak restoran dapat memahami dengan baik sehingga tidak terjadi kesulitan dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan ini diharapkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Landak adalah: Berdasarkan penghitungan potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Landak pada tahun 2021, pajak hotel memiliki potensi sebesar Rp.314.381.450 dengan jumlah realisasi sebesar Rp.145.347.320. pajak restoran memiliki potensi sebesar Rp.2.855.395.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp.2.507.541.762. Masih terdapat potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari perbandingan potensi dan realisasi pajak tahun 2021. Adanya dukungan peraturan hukum yang sesuai untuk mematuhi peraturan Daerah yang memungkinkan sistem dan prosedur pemungutan pajak dilaksanakan

dengan optimal, sehingga penerimaan pajak dapat terus tumbuh. Adanya upaya yang dilakukan oleh BPRD untuk mengatasi kendala penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Kendala dalam penerimaan pajak disebabkan karena ketidakpahaman wajib pajak tentang pembayaran pajak. Adanya Sosialisasi pajak yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga penerimaan pajak dan pendapatan Daerah dapat meningkat. Terdapat sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, tetapi dengan adanya sanksi yang berlaku masih tidak diterapkan dengan baik. Dari kesimpulan yang telah dirangkumkan di atas penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna terhadap Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Dengan besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Landak diharapkan agar pemerintah daerah cepat dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sosialisasi pajak diharapkan dapat dilaksanakan lebih intens sehingga wajib pajak dapat lebih memahami bagaimana pembayaran pajak hotel dan pajak restoran. Sanksi yang ada seharusnya dapat diterapkan dengan baik kepada wajib pajak hotel dan pajak restoran. Untuk peneliti sejenis, tidak hanya dapat menambahkan pajak hotel dan pajak restoran, tetapi juga tujuan penelitian pajak daerah lainnya dan periode yang lebih lama sehingga dapat mengetahui potensi yang ada serta dapat memperluas bidang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afif. (2021a). Implementasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Umkm Berdasarkan Sak-Emkm. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 1(2), 24–35.
- Ali Afif, E. K. (2021b). Training And Assistance For The Preparation Of Financial Reports And Tax Reporting For Msmes In Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(2), 23–30.
- Tina Mardiana. 2017. “Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang” *Jurnal Riset Akuntansi Palembang* 2017.
- Fitriani Hasan. 2020. “Analisis Potensi , Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018” *Jurnal Akuntansi*. 29 September 2020, Jakarta.
- Indan Pradita, Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kabupaten Merangin, 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.
- Apip Supriadia, Gusti Tia Ardianib, Chandra Budhi L.S. 2020. Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.1. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.
- Peraturan Daerah kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 2011. Kabupaten Landak.
- Siahan, Marihot P, 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Komaling,
- Norma. 2014. Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Tesis*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Susyanti Jeni, Ahmad Dahlan. (2015). *Perpajakan: Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Syafnidawati 2020 Kualitatif Penelitian <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, diakses 20 oktober 2020.
- Apip Supriadi, Gusti Tia Ardiani, Chandra Budhi L.S, Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Tasikmalaya. 2020 Vol 1, No 1, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.
- Dedi Mulyadi. 2020. metamorfosis desa di kabupaten kerawang. 2020 Bandung-Jawa Barat. CV Media Sains Indonesi.
- Indra Pradita. 2019. Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kabupaten Merangin. *Jurnal Ekopedia, Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*. Vol.4 No.1. 1 Juli 2019 Hal. 72-78

- Faris Arkan. 2021. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol 11, Nomor 1, Halaman 82-95. Universitas Tanjungpura Pontianak 2021.
- Revi Atriyani. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ekonomi STIE Pasim Sukabumi*, 2020
- Sarundang, Karamoy, lambey, Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 2018, 273-281